

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN LANJUT USIA
PADA BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)
DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Agni Ramaniya Maharani¹, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian penitipan lanjut usia oleh pihak keluarganya pada BPSTW Dinas Sosial DIY dalam hal lanjut usia yang dititipkan sebenarnya tidak setuju, dapat atau tidaknya memberlakukan ketentuan tentang penitipan barang terhadap perjanjian penitipan lanjut usia, dan bentuk pertanggungjawaban BPSTW Dinas Sosial DIY dalam hal lanjut usia yang dititipkan mengalami sakit atau meninggal.

Penulisan Hukum ini bersifat yuridis empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Data yang diperoleh diolah dengan metode deskriptif-kualitatif kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi lanjut usia yang sebenarnya tidak setuju untuk dititipkan, maka perjanjiannya adalah tidak sah karena ada paksaan psikis, namun perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihak sepanjang tidak dibatalkan oleh hakim. Ketentuan tentang penitipan barang tidak dapat diberlakukan pada perjanjian penitipan lanjut usia karena lanjut usia adalah orang, bukan barang. Terhadap lanjut usia yang sakit, pihak BPSTW telah melakukan langkah preventif dan kuratif, kemudian terhadap lanjut usia yang meninggal, pihak BPSTW akan memberikan pelayanan pengurusan jenazah.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Penitipan Lanjut Usia, Panti Werdha

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**IMPLEMENTATION OF THE ELDERLY CARE AGREEMENT IN
TRESNA WERDHA SOCIAL SERVICES HALL (BPSTW) UNDER THE
OFFICE OF SOCIAL SERVICES SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

By :

Agni Ramaniya Maharani³, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to know and analyze the validity of the elderly care agreement by the family in BPSTW under the Office of Social Service Special Region of Yogyakarta in the case of the elderly who is entrusted actually disagree, whether or not to apply the provisions of goods care for the elderly care agreement and the form of accountability from BPSTW under the Office of Social Service Special Region of Yogyakarta in the case of the elderly who is entrusted get sick or die.

This legal writing is empirical juridical research that combine the library research with the field research to answer a legal issues. The library research is done by analyzing the primary legal materials and the secondary legal materials. The field research is done by doing interviews with respondents. The data that obtained were processed by the descriptive-qualitative method then concluded.

The result of this legal research show that for the elderly who did not agree to entrusted, the agreement is invalid because there is a psychic compulsion, but the agreement still binding to the parties as long as it is not canceled by the judge. The provisions of goods care can not be applied to the elderly care agreement because the elderly are a people, not a goods. To the elderly who got sick, BPSTW have done a preventive and curative measures, then to the elderly who have died, BPSTW will provide the maintenance services corpse.

Keywords : Agreement, Elderly Care Agreement, Nursing Home

³ Student of Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecture of Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada